

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarsita. L. (2013). Analisis Penanganan Kredit Macet. *Manajemen Bisnis*, 3 (1), 15–20.
- Astiti. (1976). *Investarisasi Istilah-Istilah Adat Agama Dan Hukum Adat Bali (Laporan Penelitian)*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Ayuni, N. M. S. dan I. N. W. N. B. (2019). *Strategi kredit macet “pang pade payu” pada lembaga perkreditan desa di kabupaten buleleng*. 131–136.
- Bambang, H. (1999). *sistem pengendalian internal* (3rd ed.). BPFE-YOGYAKARTA.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- J. Moleong, L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 410). PT. Remaja Rosadakarya.
- Kartika, I. N. dan I. M. J. (2018). Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5–26.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2014th ed., p. 451). PT. Rajagrafindo Persada.
- Kobi, Wayan Kariarta, dkk. (2018). Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsambian Kota Denpasar. *Journal Ilmu Hukum*.
- LPD Desa Adat Menyali. 2018. *Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Perkreditan Desa*
- LPD Desa Adat Menyali. 2019. *Laporam Petanggungjawaban Lembaga Perkreditan Desa*
- Mulyawan, I Putu Arya, dkk. (2017). *PENGARUH PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KOTA DENPASAR* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia *PENDAHULUAN Pembangunan nasional merupakan rangkaian dari pembangunan seluruh aspe.* 8, 3193–3222.
- Pemerintah Provinsi Bali. 2001, *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman*
- Peraturan Gubenur Bali. 2013. *Peraturan Gubenur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana ksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah*

- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2017. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa*
- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2019. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*
- Pratama, P. Y. (2020). Mengungkap Sanksi Adat Perampangan Pada Sistem Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada. *Universitas Pendidikan Ganesha*, 2, 342–353.
- Putri, W. K. (2020). *Sanksi Nyongkok Sebagai Sistem Pengendalian Internal Dalam Penyelesaian Kredit Macet Ditinjau Dari Perspektif Nasabah, Pengurus LPD, dan Hukum Adat (Studi Kasus pada LPD Desa Pakraman Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)*. 1–14.
- Sari, K. U. K. (2017). Pemanfaatan Awig-Awig Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Menekan Tingkat Kredit Macet Pada LPD Desa Adat Panji. *Universitas Pendidikan Ganesha*, 1.
- Sayoni, G. K., & Herawati. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal dengan Penerapan Modal Sosial di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakrama Kerobokan. *E_Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Soepomo. (1983). *Kedudukan Hukum Adat Di Kemudian Hari*. Pustaka Rakyat.
- Sudiyani, N. N. (2018). Fungsi Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kredit Macet Pda Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada LPD Pakraman Bitera Kabupaten Gianyar). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 112–116.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. CV Alfabeta.
- Susilo, S. (2000). *Bank dan Lembaga Perkreditan Lainnya*. Salemba Empat.